

# TALAM MUTAA'ALIM

Jurnal Ilmiah keislaman, Pendidikan dan Pembelajaran

Challenges In The Implementation Of School-Based Curriculum (SBC) In  
The English Language Teaching (A Case Study at MIM Al Furqan and  
MIN Kelayan Banjarmasin)

Nida Mufidah

Bimbingan Akidah Terhadap Anak Usia Prasekolah (Bimbingan Aqidah yang  
Dilakukan Orang Tua yang Berprofesi Guru Agama di Kota Banjarmasin)

M. Noor Fuady

Meningkatkan Prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Jurusan  
Kependidikan Islam Prodi MPI dan BKI Melalui Alternatif  
Strategi Pembelajaran Presentation

Surawardi

Tujuan Pendidikan Islam Dalam Perspektif Hadist

Abd. Basir

Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Negara Jepang dan Sudan  
Suraijjah

Kompetensi Pedagogik Guru Akidah Akhlak Dalam Mengelola Proses  
Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Al Mujahirin Kota Banjarmasin  
Burdjani, AS

Meningkatkan Pemberdayaan Perpustakaan Melalui Pelatihan Pengelolaan  
Perpustakaan Pada Ponpes Al Falah Putera dan Puteri  
Banjarbaru Kalimantan Selatan  
Nurjannah Rianie

Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Perspektif Hukum Islam  
Hasbullah

Proses Integrasi Nilai-Nilai Karakter Dalam Pembelajaran Matematika  
di Sekolah MAN 2 Barabai  
Sessi Rewetty Rivilla



Diterbitkan Oleh :  
Jurusan Kependidikan Islam Prodi MPI & BKI  
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari  
BANJARMASIN

## **TA'LİM MUTA'ALLIM**

### **Jurnal Ilmiah Keislaman, Pendidikan dan Pembelajaran**

Terbit dua kali setahun, memuat tulisan yang diangkat dari hasil telaahan dan kajian analistis-kritis, maupun dari hasil penelitian sekitar keislaman, pendidikan dan pembelajaran sesuai ilmu yang dikembangkan

#### **Pelindung/Penanggung Jawab:**

Ketua Jurusan KI Prodi MPI & BKI  
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin

#### **Pemimpin Ketua/Ketua Pengarah:**

Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd.

#### **Ketua Penyunting:**

Surawardi, M.Ag.

#### **Sekretaris Penyunting:**

H. Fahmi Hamdi, Lc., MA.

#### **Penyunting Pelaksana:**

Fadliyanur, S.Pd.I., Helma Nuraini, S.Psi., M.Pd.

#### **Penyunting Ahli**

Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, MA., Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.,  
Drs. Abdul Hayat, M.Pd., Drs. Murdan, M.Ag., Dra. Hj. Rusdiana, M.Ag.

#### **Tata Usaha:**

Drs. Murhin, Abd. Aziz, SH., Mulyadi, S.Ag., M.AP., H. Samsuni, M.AP,  
Raudatul Jannah, SE, Salapuddin

#### **Alamat Penyunting dan Tata Usaha;**

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin  
Jurusan Kependidikan Islam Prodi MPI & BKI  
Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan 70235  
Telp. (0511) 3253939/HP.085248762451  
E-mail : tabiyah.ki@gmail.com

Dicetak pada percetakan "Comdes Kalimantan"

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

## DAFTAR ISI

*Ta'lim Muta'allim*, Vol. III Nomor 06 Tahun 2013

1. CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF SCHOOL-BASED CURRICULUM (SBC) IN THE ENGLISH LANGUAGE TEACHING (A Case Study at MIM Al Furqan and MIN Kelayan Banjarmasin) 221-242  
*Nida Mufidah*
2. BIMBINGAN AQIDAH TERHADAP ANAK USIA PRASEKOLAH (Bimbingan Aqidah yang Dilakukan Orang Tua yang Berprofesi Guru Agama di Kota Banjarmasin) 243-270  
*M. Noor Fuady*
3. MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM PRODI MPI DAN BKI MELALUI *ALTERNATIF STRATEGI PEMBELAJARAN PRESENTATION* 271-294  
*Surawardi*
4. TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF HADITS 295-312  
*Abd. Basir*
5. PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN DI NEGARA JEPANG DAN SUDAN 313-338  
*Suraijiah*
6. KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU AQIDAH AKHLAK DALAM MENGELOLA PROSES PEMBELAJARAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH AL MUHAJIRIN KOTA BANJARMASIN 339-358  
*Burdjani, AS*

7. MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN  
PERPUSTAKAAN MELALUI PELATIHAN  
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN PADA  
PONPES AL FALAH PUTERA DAN PUTERI  
BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN 359-388  
*Nurjannah Rianie*
8. KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 389-410  
*Hasbullah*
9. PROSES INTEGRASI NILAI-NILAI KARAKTER  
DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI  
SEKOLAH MAN 2 BARABAI 411-423  
*Sessi Rewetty Rivilla*

# PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN DI NEGARA JEPANG DAN SUDAN

Oleh: Suraijiah\*

## Abstrak

Permasalahan pendidikan nasional yang muncul dan sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah masalah mutu pendidikan pada setiap jenjang. Berbagai usaha sudah dilakukan termasuk salah satunya melalui program sertifikasi guru dan dosen, namun hal itu nampaknya belum sepenuhnya bisa meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di Negara ini. Tulisan ini akan mencoba mempelajari dan menyajikan langkah-langkah konkrit yang telah dilakukan oleh Negara lain terutama dari Negara Jepang dan Sudan dalam upaya pengembangan tenaga pendidik dan kependidikannya, terutama yang berhubungan dengan sistem pendidikan yang ada di negara tersebut dan berbagai kebijakan yang diambil untuk mewujudkan kemajuan pendidikan di kedua negara tersebut. Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan di Negara kita.

Kata Kunci: *pengembangan, pendidik dan kependidikan*

## A. Pendahuluan

Sebagai suatu sistem, maka dalam proses pendidikan selalu terkait beberapa komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan saling mendukung dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Komponen yang ada dalam system pendidikan tersebut meliputi; murid sebagai *raw input*, guru dan tenaga kependidikan lainnya, administrasi, kurikulum, keuangan, sarana,

---

\*Penulis adalah mahasiswa program S3 Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin.

politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, kependudukan sebagai *environmental input*. Salah satu komponen yang sangat berperan dan amat menentukan dalam keberhasilan pendidikan adalah keberadaan seorang pendidik atau guru. Karena bagaimanapun kesiapan suatu situasi pendidikan tanpa kehadiran seorang guru, hasilnya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Guru menempati keseluruhan sentral, sebab peranannya sangat menentukan, ia harus mampu menterjemahkan, menjabarkan, dan mentransformasikan nilai-nilai dalam kurikulum kepada anak didik.<sup>1</sup>

Melihat kedudukan seorang guru dalam proses pendidikan yang begitu menentukan, dimana guru merupakan unsur yang mempunyai peranan penting bagi terwujudnya pembelajaran, hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keberhasilan pendidikan, maka komponen pendidik menjadi prioritas pertama untuk dibina dan ditingkatkan profesionalnya.

Dunia pendidikan saat ini sudah memasuki era millennium ketiga, tentunya ada banyak perbedaan corak dan karakter dari masa sebelumnya, terlebih lagi pada negara-negara maju seperti; Amerika, Inggris, Perancis, Australia, Jepang, Singapura, dan masih banyak lagi negara lainnya. Di sisi lain, ada banyak negara yang masih jauh ketinggalan pendidikannya dibandingkan dengan negara-negara maju tersebut. Perubahan dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari adanya kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. "Pendidikan di masa mendatang akan menjadi milik mereka yang dapat menangkap atau mengambil manfaat (teknologi) instruksional".<sup>2</sup>

Dalam mewujudkan tujuan pendidikan, maka diperlukan ketersediaan sejumlah tenaga pendidik atau guru-guru yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan selalu siap mengembangkan dirinya agar tidak menjadi guru yang ketinggalan zaman.

---

<sup>1</sup>Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1989), h. 1.

<sup>2</sup>Setijadi, *Definisi Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), h. 26.

Seorang pendidik saat ini diharapkan memiliki kecakapan dalam bidang administrasi, inovasi, motivasi, dan evaluasi yang akan dipakai ketika mendidik anak didiknya.<sup>3</sup> Permasalahan pendidikan nasional yang muncul dan sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah masalah mutu pendidikan pada setiap jenjang. Sementara berbagai usaha telah dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun dari berbagai usaha tersebut nampaknya belum menunjukkan peningkatan yang berarti terhadap mutu pendidikan, sebagian sekolah terutama di kota-kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memperhatikan<sup>4</sup>

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya yang terkait dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan di Indonesia, yaitu dengan menjadikan guru sebagai pendidik profesional. Guru yang profesional harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang akan diajarkan dengan baik dan harus memiliki kemampuan menyampaikan atau mengajarkan ilmu yang dimilikinya (*transfer of knowledge*) secara efektif dan efisien, serta harus berpegang teguh kepada kode etik profesional, yaitu memiliki akhlak yang mulia.<sup>5</sup> Namun tidak salahnya untuk mengkaji mencoba melihat upaya pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan di Negara lain, sehingga nantinya dapat dijadikan bahan masukan untuk pengambilan kebijakan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan di Negara kita. Untuk itu, pembahasan dalam makalah ini akan

---

<sup>3</sup>Suwito dan Fauzan, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 6.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Jakarta: t.p, 2001), h. 1.

<sup>5</sup>Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 141-142.

membicarakan tentang bagaimana mengembangkan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Negara Jepang dan Sudan.

## **B. Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Sudan**

### **1. Gambaran Umum Sistem Pendidikan Sudan<sup>6</sup>**

#### **a. Sistem Perkuliahan**

Sistem perkuliahan di Sudan secara umum cukup terprogram. Artinya perguruan tinggi mempunyai rencana lengkap yang matang mulai dari saat mahasiswa tersebut tercatat sebagai mahasiswa, permulaan kuliah, libur semester I, ujian semester I, mulai kuliah semester II, dan seterusnya. Penyimpangan terhadap salah-satu poin dari program yang direncanakan tentu akan mengakibatkan terjadinya gangguan yang tidak sedikit terhadap program secara keseluruhan.

Pada umumnya diberbagai perguruan tinggi Sudan menerapkan sistem dua semester. Mungkin satu-satunya perguruan tinggi di Sudan yang masih menerapkan sistem satu semester adalah Pascasarjana *Omdurman Islamic University*. Banyak keuntungan yang diperoleh dari sistem dua semester ini yaitu antara lain bahwa materi yang akan diujikan belum sempat menumpuk dan masih berada didalam ingatan, sehingga dalam menjawab soal ujian, tingkat akurasi relatif lebih tinggi dari sistem satu semester pertahun.

Sedangkan bahasa perkuliahan yang dipakai di semua perguruan tinggi di Sudan adalah bahasa Arab Fusha. Walaupun di Sudan terdapat bahasa pasaran, akan tetapi mereka selalu melayani orang asing dengan menggunakan bahasa Arab Fusha tersebut. Hal ini mungkin tidak diperoleh di Negara Arab lain. Selain itu, hampir di semua perguruan tinggi Sudan menerapkan system hafalan. Malah di berbagai perguruan terutama perguruan Islam, diwajibkan menghafal sejumlah juz al-Qur'an atau sejumlah hadits, baik untuk tingkat S1 maupun tingkat S2 dan S3.

---

<sup>6</sup>Komaruddin Hidayat, *Belajar Islam di Timur Tengah*, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

Jadwal waktu kuliah untuk program S1 biasanya mulai dari bulan September sampai dengan Desember pada semester I dan Februari sampai bulan Mei untuk semester II. Untuk program S2 tidak ada jadwal waktu yang tetap untuk semua perguruan. Masing-masing lembaga memiliki jadwal waktu tersendiri sesuai dengan fasilitas yang dimiliki. Sedangkan untuk program S3 tidak ada lagi tatap muka yang bersifat kolektif di kelas.

Waktu kuliah biasanya diadakan dipagi hari (jam 08:00 sampai 14:00) untuk program S1 dan sore hari (jam 14:00 sampai 18:00) untuk S2, kecuali KIIAL dimana program S2 juga dilaksanakan dipagi hari. Hari libur mingguan adalah hari jum'at; dan untuk program S2 memiliki dua hari libur, yaitu Kamis dan jum'at.

#### b. Sistem Ujian

Sistem absensi masih diberlakukan secara umum di Sudan. Seorang mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian, bila jumlah kehadirannya kurang dari 75%. Namun demikian, bila seorang mahasiswa yang dari segi kehadirannya tidak berhak ikut ujian, akan diberikan dispensasi, bila yang bersangkutan mengajukan surat permohonan dengan alasan yang logis atau mengajukan surat keterangan sakit.

Mata ujian yang diujikan adalah semua materi yang diperoleh dikelas dengan ditambah praktikum, sesuai dengan fakultas dan jurusan yang diikuti. Untuk fakultas tarbiyah, praktikum terdiri atas praktek mengajar dan pembuatan penggunaan media pendidikan; untuk Fakultas Syari'ah jurusan peradilan dilakukan praktikum hukum diperadilan. Di beberapa perguruan seperti di Alqur'anul Karim and Islamic Sciences University dan Islamic University of Omdurman terdapat ujian hafal al-Qur'an. Sedangkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) seperti lazimnya di Indonesia tidak begitu populer di Sudan, walaupun ada yang melakukannya seperti KIIAL.

Beban studi yang diujikan berkisar antara 10 sampai 12 materi per semester untuk program S1 dan 6 sampai 8 materi untuk program S2 dengan sistem penilaian umum sebagai berikut: *mumtaz* (90-100), *jayyid* (70-80), *maqbul* (60-70), *rashib* (kurang dari 60). Nilai akhir yang diperoleh seorang mahasiswa diakhir

semester dan akhir tahun adalah gabungan dari semua nilai dibagi dengan jumlah materi.

Pada umumnya di Sudan tidak diterapkan sistem, tetapi diterapkan sistem tingkat. Seorang mahasiswa yang mempunyai materi yang tertinggal disatu semester tertentu harus lebih terlebih dahulu sebelum ujian semester berikutnya. Mahasiswa yang lulus bersih atau mempunyai dua materi hearing dinyatakan berhak naik tingkat.

Jumlah soal ujian yang diujikan juga relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan apa yang diujikan di Negara Arab lain. Soal ujian tersebut disajikan dalam beberapa bentuk, sebagian nampaknya seperti sepele dan ringan seperti mengisi titik-titik, pilihan berganda, sedangkan sebagian yang lain berbentuk esai. Alasan pembuatan soal dengan jumlah relatif banyak antara lain adalah agar mewakili semua materi yang diajarkan sehingga dapat diketahui sejauhmana penguasaan seorang mahasiswa terhadap materi pelajaran yang diberikan sesuai dengan batas yang digariskan dalam kurikulum. Namun ada kriteria bagi soal-soal yang diujikan tersebut yaitu bahwa soal ujian harus mewakili materi kuliah dari A sampai Z. tidak ada materi kuliah yang tidak mendapat porsi dalam soal ujian. Selain itu, semua soal ujian harus diambil dari materi yang sudah disampaikan kepada mahasiswa, bukan dari benak dosen sendiri, sehingga mahasiswa merasa punya jaminan hati untuk menghafal. Dalam arti, jika ia belajar dengan baik, pasti ia dapat menjawab soal ujian. Lebih lanjut, soal ujian disajikan dalam berbagai bentuk, karena tidak semua orang mempunyai kapasitas yang sama.

Untuk mendapatkan gelar sesuai dengan program yang diambil seorang mahasiswa diwajibkan untuk melakukan riset ilmiah. Betapun untuk program S1 tidak diwajibkan menulis skripsi seperti lazimnya di Indonesia. Tetapi ia diwajibkan untuk menulis paper untuk beberapa materi kuliah dengan ketebalan antara 5- 25 halaman. Sedangkan, bagi mahasiswa S2 diwajibkan menulis thesis. Ada dua jenis thesis yang biasa digunakan yaitu thesis yang bersifat pelengkap dan yang bersifat berdiri sendiri. Yang dimaksud dengan thesis pelengkap adalah thesis yang tebalnya minimal 40 halaman dengan literatur minimal 40 buah

buku dan diuji di tempat tertutup. Nilai dari thesis ini digabungkan kedalam nilai materi, sebagaimana materi lainnya, kemudian dibagi dengan sejumlah materi yang diperoleh, lalu ditentukan nilai rata-rata yang diperoleh seorang mahasiswa. Sedangkan thesis yang sifatnya berdiri sendiri adalah thesis dengantebal minimal 75 halaman dan jumlah literatur minimal 40 buah buku, dan diujikan di tempat terbuka dan nilainya menjadi nilai yang tertulis dalam ijazah S2 yang diperoleh.

Adapun untuk program S3 diwajibkan menulis disertasi dengan ketebalan minimal 150 halaman dan referensi minimal 100 buah buku. Disertasi ini diujikan ditempat terbuka setelah diumumkan satu minggu sebelum pelaksanaan ujian. Biasanya, sebelum memulai menulis disertasi untuk program S3, mahasiswa diwajibkan mengajukan ringkasan dari 40 literatur utama yang digunakan dalam penulisan disertasi. Ringkasan ini diujikan ditempat tertutup oleh tiga orang professor yang dihadiri oleh dosen pembimbing. Mahasiswa, baru dinyatakan boleh menulis disertasi setelah dinyatakan lulus dalam ujian komprehensif diatas.

Harus dicatat pula bahwa tidak ada batasan maksimal dalam jumlah lembaran dan jumlah literatur yang digunakan dalam penulisan thesis dan disertasi. Oleh karena itu akan sangat memungkinkan seseorang menulis thesis S2 setebal 400 halaman dengan literature lebih dari 200 buku; atau seseorang menulis disertasi setebal 600 halaman dengan jumlah literatur lebih dari 300 buku. Dalam penulisan ilmiah tersebut, baik thesis maupun disertasi, seorang mahasiswa tidak diwajibkan mengikuti sistem penulisan tertentu seperti lazimnya di beberapa lembaga pendidikan tinggi Mahasiswa diperbolehkan memilih sistem penulisan yang menurutnya lebih baik. Untuk thesis, minimal 1 tahun (dari tanggal disahkan) baru dapat diujikan dan maksimal 3 tahun baru dinyatakan kadaluarsa, sedangkan untuk disertasi minimal 3 tahun baru dapat diujikan dan maksimal 6 tahun baru dinyatakan kadaluarsa.

#### c. Perpustakaan

Hampir setiap perguruan tinggi di Sudan mempunyai perpustakaan yang cukup memadai. Selain itu, pemerintah

menyediakan sebuah perpustakaan umum di pusat kota dengan jumlah buku yang lumayan dan fasilitas cukup baik yang buka setiap hari dari jam 08.00-18.00.

Semua perpustakaan milik perguruan tertentu pada dasarnya juga terbuka untuk umum, walau dengan beberapa persyaratan tertentu dan fasilitas yang berbeda. Di antara perpustakaan ada juga yang membuat jadwal pelayanan khusus untuk wanita, seperti perpustakaan *Alqur'anul Karim and Islamic Sciences University*. Di antara perpustakaan yang ramai dikunjungi mahasiswa dan mempunyai jumlah buku yang cukup banyak antara lain adalah perpustakaan Umum, Departemen Pendidikan Tinggi, Perpustakaan *Islamic University of Africa*, Perpustakaan *Khartoum International Institute for Arabic Language (KIIAL)*, Perpustakaan *Al Quranul Karim and Islamic Sciences University* dan Perpustakaan *Islamic University of Omdurman*.

d. Perlakuan terhadap Mahasiswa

Hubungan antara mahasiswa dengan yang lain, dan mahasiswa dengan dosen atau pegawai memang cukup baik tanpa membedakan antara mahasiswa lokal maupun asing. Suatu hal yang perlu dicatat bahwa dosen-dosen Sudan memiliki moral yang sangat baik dan pada umumnya *low profile*. Mereka tidak segan-segan menanyakan hasil penulisan kita dimana pun bertemu, baik dikampus ataupun di pasar maupun di rumah kediaman.

Bantuan materil juga tidak sedikit yang diberikan kepada mahasiswa asing, walaupun sebenarnya rakyat Sudan masih sangat kekurangan. Di antara lembaga yang selalu mengusahakan beasiswa tersebut adalah WAMI. Oleh sebab itu, teman-teman yang melanjutkan S2 di Sudan (setelah menamatkan S1 di Negara Arab lainya dengan fasilitas beasiswa yang serba cukup) sering menyanjung sikap pemurah pemerintah Sudan. Mereka mengumpamakan sikap pemurah ini dengan anekdot tentang seorang yang memiliki roti dan ia betul-betul membutuhkannya,

tetapi membagi dua roti itu dan memberikan kepada orang lain yang padahal orang itu mempunyai sekeranjang roti.<sup>7</sup>

## 2. Gambaran Umum tentang Perkembangan Pendidikan di Sudan

### a. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik

Sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang, Sudan memang termasuk Negara yang belum beruntung sebagaimana Negara-negara di wilayah Timur Tengah. Sejak Perang Dunia II permintaan untuk pendidikan telah melebihi sumber daya pendidikan Sudan. Pendidikan tinggi terbatas pada University of Khartoum, kecuali kurang dari 1.000 siswa dikirim ke luar negeri oleh orang tua kaya atau beasiswa pemerintah. Tingkat melek huruf dewasa pada tahun 1956 adalah 22,9 persen, dan, meskipun upaya dari pemerintah dalam memperbaharui pendidikan, pada tahun 1990 telah meningkat hanya sekitar 30 persen. Selain itu, meningkatnya permintaan tenaga pendidik untuk pendidikan menengah dan tinggi tidak dapat dipenuhi oleh guru Sudan sendiri, yang lulus dari perguruan tinggi pelatihan guru elit di Bakht ar Rud Akibatnya, pendidikan di Sudan terus bergantung pada guru luar negeri yang mahal.

Ketika pemerintah Nimeiri mengambil alih kekuasaan pada tahun 1969, itu dianggap sebagai sistem pendidikan yang tidak memadai untuk kebutuhan pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, reorganisasi yang luas diusulkan, yang akhirnya akan membuat program wajib belajar sekolah dasar 6 tahun dan lebih banyak perhatian pada pendidikan teknik dan kejuruan di semua tingkatan. Pada akhir 1970-an, sistem pendidikan pemerintah sebagian besar telah direorganisasi. Ada beberapa sekolah preprimary, terutama di daerah perkotaan. Sistem dasar terdiri dari kurikulum enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun kurikulum di sekolah menengah pertama. Dari titik itu, siswa yang memenuhi syarat bisa pergi ke salah satu dari tiga jenis sekolah: tiga tahun menengah atas, yang mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi, sekolah teknik komersial dan

---

<sup>7</sup>Komaruddin Hidayat, *Belajar Islam di Timur Tengah*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, t.h), h. 99-105.

pertanian, dan sekolah menengah pelatihan guru yang dirancang untuk mempersiapkan guru SD.

Selama tahun 1980, pemerintah mendirikan lebih banyak sekolah di semua tingkat dan sekolah pelatihan guru, meskipun ini tidak pernah cukup untuk menyediakan staf yang memadai. Membangun sekolah dasar, pemerataan dalam distribusi sekolah menengah, bahkan lebih penting adalah pengembangan kurikulum sekolah dasar yang diarahkan untuk pemberian pengalaman praktis dengan memperhitungkan bahwa sebagian besar dari mereka yang menyelesaikan enam tahun bersekolah tidak melangkah lebih jauh. Asumsi yang realistis adalah bahwa sumber daya Sudan yang terbatas dan bahwa pengeluaran pada tingkat pengeluaran post primary terbatas pada tingkat dasar, meninggalkan sebagian besar anak-anak Sudan dengan pendidikan yang tidak memadai. Pada awal 1990-an situasi ini tidak berubah secara signifikan.

Pada pertengahan 1970-an, ada empat universitas, sebelas perguruan tinggi, dan dua puluh tiga lembaga di Sudan. Universitas-universitas berada di daerah ibukota, dan semua lembaga-lembaga pendidikan tinggi berada di provinsi-provinsi utara. Perguruan tinggi yang khusus pemberian gelar-lembaga. Lembaga diberikan ijazah dan sertifikat untuk periode studi khusus lebih pendek daripada yang biasanya dituntut di universitas dan perguruan tinggi. Lembaga-lembaga post secondary dan universitas Sudan telah memberikan sejumlah besar orang-orang terdidik di beberapa bidang tetapi masih kekurangan personil teknis dan spesialis dalam ilmu yang relevan dengan karakter negara yang sebagian besar warganya hidup di pedesaan.

Pada tahun 1980 dua universitas baru telah dibuka, satu di provinsi Al Awsat di Wad Madani, yang lain di Juba di provinsi Al Istiwai, dan pada tahun 1981 dibuka sebuah universitas di Darfur. Pada tahun 1990 sebagian lembaga telah diupgrade ke perguruan tinggi, dan sebagian telah menjadi badan otonom yang disebut Institut Khartoum dari Sekolah Tinggi Teknik (juga disebut sebagai Khartoum Politeknik). Beberapa afiliasinya

berada di luar daerah ibukota, misalnya, College Teknik Mesin di Atbarah, timur laut dari Awsat.

Universitas tertua adalah University of Khartoum, yang didirikan sebagai universitas pada tahun 1956. Pada tahun 1990 itu terdaftar sekitar 12.000 siswa di program gelar mulai dari empat hingga enam tahun lama belajarnya dan cabang Khartoum dari Universitas Kairo dengan 13.000 siswa. Kurangnya prestise mencerminkan kenyataan bahwa sebagian besar mahasiswa bekerja untuk mendukung diri mereka sendiri. Biaya kuliah hanya di cabang Khartoum adalah gratis, sedangkan semua biaya di Universitas Khartoum telah dibayar oleh pemerintah. Pada Institut Studi Teknik Tinggi, yang memiliki 4.000 mahasiswa pada tahun 1990, biaya kuliah adalah gratis, dan ada hibah bulanan membantu untuk membiayai tapi tidak sepenuhnya menutupi biaya-biaya lain. Universitas terkecil di wilayah ibukota adalah Universitas Islam Omdurman, yang ada untuk melatih para hakim dan ulama Muslim.

The University of Juba, didirikan pada tahun 1977, lulus kelas pertama pada tahun 1981. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan pendidikan bagi pembangunan dan untuk layanan sipil untuk Sudan selatan, meskipun itu terbuka untuk siswa dari seluruh negeri. Pada tahun pertama, ia mendaftarkan sejumlah besar pegawai negeri dari selatan untuk pelatihan lebih lanjut, jelas dibutuhkan di daerah di mana banyak pegawai negeri memiliki kesempatan pendidikan sedikit di masa muda mereka. Setelah pecahnya permusuhan di selatan pada tahun 1983, universitas dipindahkan ke Khartoum, sebuah langkah yang sangat membatasi program instruksional, tetapi universitas terus beroperasi lagi di Juba pada akhir 1980-an. Al Jazirah adalah Fakultas Pertanian dan Sumber Daya Alam juga dimaksudkan untuk melayani negara secara keseluruhan, namun fokusnya adalah konsisten dengan lokasi di daerah pertanian yang paling signifikan di Sudan. Yang menarik adalah pertumbuhan dinamis dan perluasan Omdurman Ahlia Universitas. Ini didirikan oleh akademisi, profesional, dan pengusaha pada tahun 1982 pada ulang tahun ke seratus dari berdirinya kota Omdurman dan dimaksudkan untuk memenuhi permintaan yang semakin

berkembang untuk pendidikan tinggi dan pelatihan. Universitas adalah menjadi non-pemerintah, pekerjaan yang berorientasi, dan mandiri. Dukungan datang terutama dari sumbangan swasta, yayasan asing, dan pemerintah, yang menyetujui peruntukan tiga puluh hektar tanah utama di pinggiran barat Omdurman untuk kampus. Kurikulumnya, diajarkan dalam bahasa Inggris dan berorientasi pada pelatihan kerja yang berkaitan dengan kebutuhan Sudan, telah menarik lebih dari 1.800 mahasiswa pada tahun 1990. Penekanannya pada pelatihan di bidang administrasi, studi lingkungan, fisika dan matematika, dan ilmu perpustakaan telah terbukti populer.

Pendidikan untuk perempuan, secara tradisional, pendidikan anak perempuan adalah dari jenis yang paling sederhana, sering disediakan oleh khalwah, atau sekolah agama, di mana studi Alquran diajarkan. Sekolah dasar semacam itu tidak mempersiapkan anak perempuan perintis dari Syaikh Babikr Badri, pemerintah telah memberikan lima sekolah dasar untuk anak perempuan pada tahun 1920. Ekspansi lambat, namun, mengingat bias untuk anak laki-laki dan konservatisme Sudan masyarakat, dengan pendidikan terbatas pada tingkat SD sampai 1940. Barulah pada tahun 1940 ada sekolah menengah pertama untuk anak perempuan, Sekolah Menengah Girls Omdurman dibuka. Pada tahun 1955, ada sepuluh sekolah menengah untuk anak perempuan. Pada tahun 1956, Sekolah Menengah Omdurman untuk Girls, dengan sekitar 265 siswa, sekolah menengah gadis-gadis hanya dioperasikan oleh pemerintah. Pada tahun 1960, 245 sekolah dasar untuk anak perempuan telah didirikan, tetapi hanya 25 sekolah menengah atau umum SMP dan 2 sekolah atas menengah. Tidak ada sekolah kejuruan untuk anak perempuan, hanya Training College Nurses dengan sebelas siswa, menyusui dianggap oleh banyak orang sebagai panggilan terhormat bagi perempuan Sudan. Selama tahun 1960-an dan 1970-an, pendidikan anak perempuan membuat keuntungan yang cukup besar di bawah reformasi pendidikan yang disediakan 1.086 sekolah dasar, 268 sekolah menengah, dan 52 sekolah kejuruan untuk anak perempuan pada tahun 1970, ketika pendidikan mengklaim gadis-gadis sekitar sepertiga dari total

sumber daya sekolah yang tersedia. Ini perkembangan yang lambat dari pendidikan anak perempuan adalah produk dari tradisi negara itu. Orang tua dari gadis Sudan cenderung memandang sekolah anak perempuan dengan kecurigaan bahwa akan merusak moral anak-anak perempuan mereka. Selain itu, preferensi diberikan kepada anak-anak, yang dengan pendidikan bisa memajukan diri dalam masyarakat untuk kebanggaan dan keuntungan dari keluarga. Nilai mereka tidak ditingkatkan di sekolah tetapi di rumah, dalam persiapan untuk pernikahan dan mahar yang disertai upacara. Gadis itu adalah aset berharga dalam rumah sampai menikah, baik di dapur atau di ladang. Akhirnya, banyak yang putus sekolah bahkan mereka hanya menginginkan pendidikan dasar untuk anak perempuan mereka. Situasi ini agak suram seharusnya tidak mengaburkan upaya sukses sekolah seperti Ahfad University College di Omdurman, didirikan oleh Babikr Badri sebagai sekolah dasar untuk anak perempuan pada tahun 1920 dan pada tahun 1990 itu telah berevolusi menjadi universitas utama wanita di Sudan dengan pendaftaran 1.800 orang. Itu campuran program akademik dan praktis, seperti wanita berpendidikan untuk mengajar di daerah pedesaan.

#### b. Reformasi Pendidikan di Sudan

Pemerintah revolusioner Jenderal Bashir mengumumkan reformasi pendidikan di Sudan pada September 1990. Dalam konsultasi dengan para pemimpin Ikhwanul Muslimin dan guru Islam dan administrator, yang merupakan pendukung terkuat dari rezimnya, Bashir menyatakan sebuah filosofi baru pendidikan. Dia mengalokasikan £ Sd400 juta untuk tahun akademik 1990-1991 untuk melaksanakan reformasi dan berjanji untuk melipatgandakan jumlah jika sistem pendidikan saat ini dapat diubah untuk memenuhi kebutuhan Sudan. Filosofi pendidikan yang baru adalah untuk memberikan kerangka acuan bagi reformasi. Pendidikan itu harus didasarkan pada keabadian sifat manusia, nilai-nilai agama, dan sifat fisik. Hal ini hanya bisa dicapai dengan kurikulum Muslim, yang di semua sekolah, perguruan tinggi, dan universitas akan terdiri dari dua bagian: sebuah wajib dan kursus opsional studi. Semua elemen penting

dari program wajib akan diambil dari Quran dan buku-buku yang diakui hadits.

Apakah pemerintah bisa melaksanakan reformasi menyapu seluruh negeri tersebut dalam menghadapi oposisi dari dalam pembentukan pendidikan Sudan dan kelangkaan sumber daya untuk melaksanakan seperti proyek ambisius masih harus dilihat. Keanggotaan dalam Angkatan Pertahanan Populer, sebuah badan paramiliter bersekutu dengan Front Islam Nasional, menjadi persyaratan untuk masuk universitas. Pada awal 1991, Bashir telah menetapkan bahwa jumlah mahasiswa menjadi dua kali lipat dan Arab menggantikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di universitas. Dia pecat sekitar tujuh puluh anggota fakultas di Universitas Khartoum yang menentang reformasi.<sup>8</sup>

### 3. Hasil Analisa Penulis

Sebagai Negara yang sedang berkembang dan banyak diliputi kemelut perang saudara, Sudan memang masih banyak membutuhkan pembenahan terhadap pendidikannya, terutama dalam rangka pemenuhan tenaga pendidikan yang cukup berkualitas, meskipun demikian langkah cepat sudah diambil oleh pihak pemerintah dalam rangka mengatasi keterbatasan pendidikan di Sudan, seperti memperbanyak pembangunan lembaga pendidikan, mengirim dan memberi beasiswa pendidikan ke luar negeri, memperluas kesempatan pendidikan bagi anak perempuan, menyediakan dana yang sangat besar untuk pengembangan pendidikan, dan mengambil tenaga pendidikan di luar dengan pembayaran yang tinggi untuk memenuhi keterbatasan tenaga kependidikan di Negara tersebut.

Langkah-langkah konkrit dari Negara tersebut dalam pengembangan pendidikan terutama tenaga pendidik dan kependidikan menunjukkan adanya perhatian dan pemahaman yang benar terhadap urgennya pendidikan sebagai solusi bagi penyelesaian berbagai ketertinggalan yang dihadapi oleh Negara tersebut untuk menuju tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan

---

<sup>8</sup><http://www.lupinto.com/country-guide:study/sudan/sudan63.html> SWT17112002

seperti yang telah dicapai oleh Negara yang sudah meraih kemajuan.

Crow and Crow dalam Ety Rohaity Rahayuningsih menjelaskan bahwa "*Modern educational theory and practice not only are aimed at preparation for future but also are operative in determining the pattern of present, by day attitude and behavior*"<sup>9</sup> Teori dan praktek pendidikan modern tidak hanya bertujuan untuk mempersiapkan kehidupan masa depan tapi juga untuk menentukan pola yang muncul melalui sikap dan perilaku sehari-hari.

### C. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Jepang

#### 1. Gambaran Umum Sistem Pendidikan Jepang

##### a. Tahap pendidikan

Sistem pendidikan tersusun atas lima tahap: taman kanak-kanak (satu sampai tiga tahun), sekolah dasar (enam tahun), sekolah menengah pertama (tiga tahun), sekolah menengah atas (tiga tahun), dan universitas (pada umumnya empat tahun). Ada juga junior college (akademi) yang menyelenggarakan studi selama dua atau tiga tahun. Selain itu banyak universitas menyediakan pendidikan pasca-sarjana untuk studi lanjutan.

##### b. Sistem pendanaan

Pendidikan diberikan secara cuma-cuma untuk semua anak yang berusia antara 6-15 tahun, namun bagian terbesar dari lulusan SMP mau meneruskan pelajarannya, dan nyatanya SMA sekarang menjadi bagian penting dari pendidikan anak. Pada tahun 1986, 94% dari semua siswa masuk SMA, yaitu rasio yang sama dengan Amerika Serikat, dan 35% dari semua lulusan SMA meneruskan pelajarannya ke Universitas. Rasio ini lebih kecil dari Amerika Serikat dimana hampir 50% masuk universitas, tetapi lebih dari Negara Eropa Barat dimana angka rata-rata berkisar antara 20% dan 30%.

---

<sup>9</sup>Crow and Crow dalam Rohaity Poncorini, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 6-7.

Disamping akademi dan universitas, sebagian siswa masuk sekolah kejuruan. Universitas terbuka dibuka pada tahun 1985 untuk memberikan kesempatan kepada orang dewasa untuk meneruskan pendidikan mereka dengan mendengarkan kuliah yang disiarkan melalui radio atau televisi.

Sebagaimana fasilitas pendidikan negeri yang tersedia, sekolah swasta terdapat disemua tahap sistem pendidikannya. Sekolah-sekolah ini secara khusus memegang peran yang sangat penting dalam pendidikan prasekolah dan universitas, yang keduanya berada di luar ruang lingkup sistem wajib. Sejak bulan Mei tahun 1986 sebanyak 76% anak-anak taman kanak-kanak, dan 73% mahasiswa universitas, terdaftar di lembaga swasta, juga 28% dari semua siswa sekolah menengah belajar di sekolah swasta.

Jumlah siswa jepang yang belajar di luar negeri terus meningkat. Pada tahun 1986, 24.000 mahasiswa belajar di luar negeri. Pada tahun yang sama, dijepang ada 15.000 mahasiswa, 85% berasal dari Asia. Administrasi sistem pendidikan jepang didesentralisasi; peran kementerian pendidikan pada umumnya merupakan peran koordinasi. Tanggung jawab atas anggaran sekolah, program pendidikan, penunjukan sekolah, dan pengawasan sekolah-sekolah dasar dan menengah pertama terletak di tangan badan-badan pendidikan setempat. Anggota badan tersebut dipilih oleh kepala administratif dari otoritas pemerintah setempat.

#### c. Sistem pembelajaran

Mengenai pendidikannya, tiap sekolah mengatur kurikulum pengajarannya sesuai dengan "pedoman pelajaran" yang dibuat dan diterbitkan oleh kementerian pendidikan. Buku pelajaran dipilih oleh badan-badan pendidikan setempat dari buku-buku yang disetujui oleh kementerian.

#### d. Sistem ketenagaan

Latar belakang pendidikan merupakan faktor penting dalam sistem kepegawaian seumur hidup Jepang. Untuk mendapatkan pekerjaan diperusahaan top, yang bersangkutan harus lulus dari universitas top pula, hal mana berarti harus juga lulus dari SMA dan SMP yang cukup top. Karena persaingan

dalam ujian masuk sangat sengit, semakin banyak siswa sekarang mengikuti sekolah bimbingan khusus. Sekolah-sekolah ini didirikan untuk membantu para siswa memasuki sekolah pilihannya, dan ada untuk semua tingkatan mulai dari persiapan taman kanak-kanak sampai ujian masuk universitas.

Perubahan yang diadakan setelah restorasi Meiji dan Perang Dunia II membuka jalan untuk penyebaran pendidikan di Jepang, namun baru-baru ini muncul berbagai masalah di sekolah-sekolah; antara lain kekerasan, gertakan dan persaingan yang sengit untuk mendapatkan tempat di sekolah-sekolah terbaik. Disamping itu, semakin nyata bahwa sistemnya harus dirombak menjadi suatu sistem yang lebih tepat untuk masyarakat Jepang di masa resturkturisasi industri, pengembangan teknologi dan internasionalisasi.

Pada tahun 1994, Majelis Nasional untuk Pembaharuan Pendidikan, yaitu sebuah komisi penasehat bagi perdana menteri, dibentuk untuk memikirkan masalah-masalah tersebut dan menentukan sasaran jangka panjang bagi sistem pendidikan. Pada tahun 1987, majelis ini mengeluarkan rekomendasi berdasarkan prinsip menghargai individualitas keperluan akan menggalakkan pendidikan seumur hidup dan keperluan untuk menjawab internasionalisasi masyarakat Jepang dan revolusi informasi:

- 1) Pada tingkat sekolah menengah pertama dan atas seharusnya ditawarkan seleksi mata pelajaran yang lebih banyak variasi
- 2) Sistem ujian masuk universitas harus diubah supaya masing-masing universitas diizinkan melakukan ujiannya sendiri,
- 3) Kesempatan pendidikan untuk orang yang tidak terdaftar di sekolah, harus ditingkatkan, dan
- 4) Sistem penerimaan siswa asing harus diperbaiki.<sup>10</sup>

## 2. Gambaran Umum tentang Perkembangan Pendidikan Jepang

### a. Pendidik dan Peserta Didik

---

<sup>10</sup>Chalidjah Hasan, *Kajian Perbandingan Pendidikan*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h.105-110.

Secara umum, keyakinan yang sudah mendarah daging bahwa kerja keras dan ketekunan akan menghasilkan kesuksesan dalam hidup. Jepang adalah masyarakat yang berpikiran pendidikan tinggi. Pendidikan adalah terhormat, dan prestasi pendidikan merupakan prasyarat untuk sukses dalam pekerjaan dan di masyarakat pada umumnya. Menyadari dari awal bahwa pendidikan itu penting untuk pembangunan bangsa dan modernisasi, para pemimpin Meiji membentuk sistem pendidikan publik untuk membantu Jepang mengejar ketinggalan dengan Barat. Misi dikirim ke luar negeri untuk mempelajari sistem pendidikan dari negara-negara Barat terkemuka. Misi ini dan pengamat lainnya kembali dengan ide-ide desentralisasi, dewan sekolah setempat, dan otonomi guru.

Serangkaian laporan yang diterbitkan antara tahun 1985 dan 1987 oleh Dewan Nasional Reformasi Pendidikan. Laporan akhir diuraikan penekanan dasar dalam menanggapi internasionalisasi pendidikan, teknologi informasi baru, dan media dan penekanan pada individualitas, belajar sepanjang hayat, dan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Untuk mengeksplorasi arah yang baru, dewan menyarankan bahwa perlu merancang pendidikan untuk abad kedua puluh satu, menyelenggarakan sistem pembelajaran seumur hidup dan mengurangi penekanan pada latar belakang pendidikan individu, meningkatkan dan diversifikasi pendidikan tinggi; memperkaya dan diversifikasi pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas guru, beradaptasi dengan internasionalisasi, beradaptasi dengan era informasi, dan melakukan review terhadap administrasi dan keuangan pendidikan. Pengajaran tetap merupakan profesi terhormat, dan guru memiliki status sosial yang tinggi, yang berasal dari warisan budaya Jepang dan pengakuan publik. Masyarakat mengharapkan para guru untuk mewujudkan cita-cita mereka untuk menanamkan moral dan pengembangan karakter anak-anak. Pendidikan moral formal kelas, instruksi informal, dan bahkan kelas akademik semua dipandang sebagai tempat yang sah untuk jenis pengajaran. Tanggung jawab guru untuk sekolah dan siswa sering melampaui kelas, dari halaman sekolah dan setelah jam sekolah. Gurudibayar, dan perbaikan secara berkala juga

dibuat dalam gaji guru dan kompensasi. Gaji awal lebih baik dibandingkan dengan orang lain yang profesional kerah putih dan dalam beberapa kasus lebih tinggi. Selain gaji, guru yang memenuhi syarat untuk berbagai jenis tunjangan khusus dan bonus (dibayar dalam tiga kali angsuran), yang berjumlah sekitar lima bulan gaji. Guru juga menerima tunjangan kesehatan dan pensiun standar yang tersedia untuk sebagian besar gaji pekerja. Apakah untuk hadiah ekonomi, status sosial, atau keinginan untuk mengajar, jumlah orang yang ingin masuk mengajar cukup banyak sebanyak lima atau enam pelamar untuk setiap posisi satu. Papan prefektur dan badan-badan publik lainnya dapat memilih yang terbaik yang memenuhi syarat dari para pelamar. Pada akhir 1980-an, sebagian besar guru baru memasuki profesi dengan gelar sarjana, meskipun sekitar 25 persen dari jumlah tenaga pengajar di tingkat SD tidak memiliki gelar sarjana. Program untuk calon guru di tingkat sarjana termasuk studi di pendidikan serta konsentrasi dalam bidang akademik. Kebanyakan guru baru mengambil jurusan dalam suatu mata pelajaran selain pendidikan, dan lulusan perguruan tinggi pendidikan masih minoritas. Setelah lulus, guru harus lulus ujian prefektur-tingkat untuk dilisensikan oleh dewan prefektur pendidikan. Perubahan juga terjadi selama tahun 1980 di in-service training dan supervisi guru baru. In-service training, terutama yang dilakukan di bawah naungan Departemen Pendidikan. Setelah perdebatan yang cukup, dan beberapa oposisi dari Jepang Persatuan Guru (Nihon Kyoshokuin Kumiai-Nikkyoso), sebuah sistem baru pelatihan guru diperkenalkan pada tahun 1989. Sistem baru menetapkan program satu tahun pelatihan, diperlukan bagi guru baru untuk bekerja di bawah arahan seorang guru.

Persatuan Guru Jepang, didirikan pada tahun 1947, adalah persatuan guru terbesar di akhir tahun 1980. Serikat buruh berfungsi sebagai federasi nasional serikat guru prefektur, meskipun masing-masing serikat memiliki otonomi yang cukup dan kekuatan sendiri dan orientasi politik. Secara historis, telah terjadi pertentangan yang cukup besar antara serikat pekerja dan Kementerian Pendidikan, karena berbagai faktor.

Departemen Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (sering disingkat menjadi Departemen Pendidikan atau Monbusho) merupakan otoritas utama atas pendidikan tinggi. Ini menyetujui pembentukan semua lembaga baru, baik negeri maupun swasta, dan langsung mengontrol anggaran dari semua lembaga nasional dan lembaga penelitian afiliasi mereka. Selain itu, kementerian mengatur banyak aspek dari lingkungan universitas. Kementerian juga memberikan subsidi kepada swasta lembaga pendidikan tinggi untuk operasidan membuat pinjaman jangka panjang untuk perbaikan bangunan fisik.

Departemen Pendidikan memiliki dua bidang utama dari tanggung jawab yang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian. Selain itu bertanggung jawab atas perguruan tinggi nasional dan membangun lembaga penelitian mereka, kementerian juga mempromosikan penelitian yang dilakukan di universitas dan didanai baik individu maupun lembaga. Sekitar setengah lusin lembaga penelitian, seperti Institut Nasional untuk Penelitian Pendidikan dan Institut Nasional Pendidikan Khusus, juga di bawah pengawasan Kementerian langsung.

Internasionalisasi adalah masalah di setiap tingkat pendidikan, tetapi terutama untuk pendidikan tinggi. Jumlah mahasiswa yang belajar di Jepang dari negara-negara asing, terutama negara-negara Asia, meningkat. Pada tahun 1988 sekitar 25.000 mahasiswa asing dari lebih dari 100 negara yang belajar di universitas di Jepang dan perguruan tinggi, dan pelayanan yang diharapkan angka menjadi 100.000 pada awal abad kedua puluh satu.

Kementerian ini juga bekerja untuk mengatur dan meningkatkan standar untuk mengajar mahasiswa asing dan berusaha untuk meningkatkan pengaturan keuangan mereka dan biaya hidup mereka. Mulai tahun 1980-an, universitas di Jepang mendirikan cabang di Amerika Serikat, dan banyak sekolah di Amerika Serikat juga mendirikan cabang Jepang. Dewan Universitas membentuk subkomite pada sekolah pascasarjana yang terdiri dari akademisi, peneliti, dan eksekutif perusahaan. Banyak program untuk pertukaran ilmiah internasional dan peneliti asingdan mahasiswa pascasarjana asing di Jepang.

### b. Reformasi Pendidikan Jepang

Untuk tetap kompetitif dan untuk menjamin masa depannya, Jepang perlu melakukan perubahan serius dalam pendidikan dan penelitian struktur. Institusinya harus lebih fleksibel dan beragam dan kebutuhan untuk mendorong kreativitas dalam pendidikan yang akan mendorong teknologi baru. Tanggung jawab pendidikan sosial dibagi oleh semua tingkat pemerintahan, terutama oleh pemerintah daerah. Meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan sosial, pelatihan staf, dan penyebaran informasi tentang kesempatan belajar seumur hidup. Jepang adalah pembaca rakus. Toko buku terkenal penuh dari saat mereka membuka pintu mereka setiap hari dengan pembaca mencari buku-buku dari berbagai judul mengejutkan asing maupun Jepang. Empat tim teratas surat kabar nasional saja memiliki sirkulasi harian gabungan (dengan dua edisi setiap hari) lebih dari 35 juta, dan ada empat harian berbahasa Inggris kertas juga. Meskipun pendidikan di Jepang berada dalam masa transisi dalam banyak hal, itu masih mempertahankan struktur organisasinya pascaperang. Bahkan dengan tekanan yang berkembang untuk reformasi dan untuk lebih menekankan pada individualitas dan internasionalisasi di bidang pendidikan.<sup>11</sup>

### 3. Hasil Analisa Penulis

Jepang merupakan Negara yang memiliki kekuatan mental untuk meraih sebuah kesuksesan. Ini merupakan salah satu modal dasar yang dapat mengantarkan Negara Jepang sebagai Negara maju dan saat ini mampu bersaing dengan Negara lain yang sudah terdahulu meraih kesuksesan dan kemajuan. Sikap ini juga memberikan warna dalam perkembangan pendidik dan peserta didik yang selalu siap untuk maju dan berkreaitifitas menuju individualitas dan internasionalisasi. Adapun berbagai langkah konkrit yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah dalam rangka membangun dan mengembangkan pendidikan di Jepang, seperti: 1) Kementerian langsung mengawasi Institut Nasional untuk Penelitian Pendidikan dan Institut Nasional Pendidikan

---

<sup>11</sup><http://www.lupinfo.com/country-guide-study/japan/japan96.html> SWT16112002

Khusus; 2) merancang pendidikan untuk abad kedua puluh satu; 3) menyelenggarakan sistem pembelajaran seumur hidup dan mengurangi penekanan pada latar belakang pendidikan individu; 4) meningkatkan dan diversifikasi pendidikan tinggi; 5) memperkaya dan diversifikasi pendidikan dasar dan menengah; 6) meningkatkan kualitas guru; 7) beradaptasi dengan internasionalisasi; 8) beradaptasi dengan era informasi; dan 9) melakukan review terhadap administrasi dan keuangan pendidikan.

#### **D. Pembahasan**

Dari paparan di atas, dapat ditemukan titik perbedaan antara proses pengembangan pendidikan di Negara Sudan dan Jepang.

1. Sudan merupakan Negara yang diliputi dengan kemiskinan dan perang saudara serta lingkungan budaya yang masih konservatif. Sedangkan Jepang adalah Negara yang memiliki latar belakang budaya yang maju dan memiliki perspektif pendidikan tinggi.
2. Pembangunan pendidikan di Sudan masih terhambat dengan kekurangan SDM dan pendanaan serta sikap masyarakat yang kurang merespon terhadap eksistensi pendidikan. Sedangkan di Negara Jepang, tersedia SDM dan anggaran pendanaan untuk membangun pendidikan.
3. Pengembangan pendidikan di Sudan sangat lamban dan masih belum meratanya pembangunan pendidikan di perkotaan dengan di pedesaan. Sedangkan di Jepang, pendidikan sudah memiliki lembaga yang menaunginya dan bertanggung jawab atas segala pengelolaan dan pengembangan pendidikan yaitu Departemen Pendidikan ( Monbusho).

Seorang tokoh pendidikan Jepang mengatakan bahwa pembaruan yang menyeluruh terjadi di Jepang karena adanya pengaruh investasi pendidikan.<sup>12</sup> Tidak dapat disangkal lagi bahwa pendidikan merupakan kunci pembangunan dalam sebuah

---

<sup>12</sup>Sam M.Chan dan Tuti T.Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo di Persada, 2011), h. 53.

Negara. Kemajuan yang dicapai dalam pendidikan akan menjjadi tolok ukur kemajuan yang akan dicapai sebuah Negara. Ujung tombak dari setiap kebijakan pendidikan adalah pengembangan tenaga pendidiknya, karena merekalah yang bertanggungjawab atas pencapaian tujuan dan pengembangan kurikulum di sekolah.

Hingga saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan yang berat, terutama dalam konteks pendidikan. Diantara tantangan itu adalah:

1. Globalisasi di bidang budaya, etika, dan moral, sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang transportasi dan informasi.
2. Rendahnya tingkat sosial capital (sikap amanah).
3. Mutu pendidikan yang masih rendah.
4. Disparitas kualitas pendidikan antar daerah masih tinggi.
5. Persaingan alumni dalam pekerjaan semakin ketat.
6. Angka pengangguran lulusan sekolah dan perguruan tinggi semakin meningkat.
7. Tenaga asing meningkat.<sup>13</sup>

Dengan memperhatikan pengembangan pendidikan di Sudan dan di Jepang, maka minimal ada tiga arah kebijakan yang diambil terkait dengan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan di Negara kita, yaitu:

1. Kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan;
2. Kebijakan yang terkait dengan proses pengadaan dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Kebijakan yang berhubungan dengan upaya peningkatan profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Dalam hubungannya dengan kondisi pendidikan dewasa ini, Tilaar menyatakan bahwa Pendidikan nasional dewasa ini dihadapkan pada empat krisis pokok, yaitu berkaitan dengan kuantitas, relevansi, atau efisiensi eksternal, elitism, dan manajemen. Lebih jauh dikemukakan bahwa sedikitnya ada delapan masalah pokok sistem pendidikan nasional: (1) menurunnya moral dan akhlak peserta didik, (2) pemerataan

---

<sup>13</sup>Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 16-17.

kesempatan memperoleh pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan, (3) rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan, (4) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan nasional, (5) masih rendahnya efisiensi eksternal sistem pendidikan dan pelatihan, (6) kelembagaan pendidikan dan pelatihan, (7) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional dan (8) sumber daya yang belum professional.<sup>14</sup>

### **E. Penutup**

Kajian teori, analisis dan pembahasan dalam makalah ini menunjukkan bahwa masing-masing Negara memiliki karakter yang khas dalam berbagai upaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, hal ini tentunya tidak terlepas dari kondisi politik dan ekonomi, juga sosial budaya dari kedua Negara tersebut. Ada beberapa langkah konkrit yang telah dilaksanakan oleh kedua Negara tersebut dalam rangka pengembangan pendidikan khususnya tenaga kependidikannya yang bisa menjadi bahan perbandingan dalam pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan di Indonesia, diantaranya:

1. Pengiriman tenaga pendidik dan kependidikan untuk pendidikan ke luar negeri.
2. Perluasan kesempatan belajar bagitenaga pendidik dan kependidikan.
3. Penyediaan sarana dan prasarana bagi pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan.
4. Penyediaan dana bagi upaya pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan.

### **F. Daftar Pustaka**

Hasan, Chalidjah, *Kajian Perbandingan Pendidikan*, Surabaya, Al Ikhlas, 1995.

---

<sup>14</sup>Samsul Nizar, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam*, (Ciputat: Ciputat Press Group, 2005), h. 214-215.

Hidayat, Komaruddin, *Belajar Islam Di Timur Tengah*, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2005.

<http://www.lupinfo.com/country-guide-study/japan/japan96.html>  
SWT16112002

M. Chan, Sam dan Tuti T.Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.

Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009.

Nizar, Samsul, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta, Ciputat Press Group, 2005.

Setijadi, *Definisi Teknologi Pendidikan*, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, 1994.

Sudjana, Nana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 1989.

Suwito dan Fauzan, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2005.

ISSN. 2088-2947



9 772088 294008